

**Analisis Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Peningkatan Ekonomi Sektor jasa,  
(Studi Kasus Kota Manado 2007-2013)**

**Rio Mamesah, Een N. Walewangko, Goerge M .V Kawung**  
**Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi**  
riostevanus\_mamesah@yahoo.com

**ABSTRACT**

Pembangunan ekonomi di daerah saat ini sudah semakin terbuka lebar dengan lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih berpihak ke daerah dalam konteks otonomi daerah, tapi bukan hanya dituntut untuk bisa berotonomi secara kewenangan pemerintah daerah juga dituntut untuk bisa berotonomi dalam hal keuangan untuk itu perencanaan yang matang perlu dilakukan. Komponen belanja investasi/belanja langsung pemerintah dalam bentuk belanja modal dan belanja pegawai merupakan salah satu penggenjot roda perekonomian. Manado sebagai ibukota Sulawesi Utara (Sulut) merupakan kota yang mengandalkan sector jasa guna mendongkrak perekonomiannya. Dalam penelitian ini digunakan alat analisis Ordinary Least Square (OLS) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap peningkatan ekonomi sector jasa. Dari hasil pengujian didapati angka R square sebesar 73,0 yang artinya pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi sector jasa adalah 73 persen sedangkan sisanya sebesar 27 persen dipengaruhi oleh variable lain yang ada di luar penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah melalui komponen pengeluarannya sangat berpengaruh terhadap peningkatan sector jasa yang merupakan salah satu sector unggulan, untuk itu perhatian serius melalui perencanaan dan pengalokasian belanja perlu untuk diberi perhatian lebih dari pemerintah.

*Kata kunci : Belanja Modal, Belanja Pegawai, Otonomi, Sektor Jasa*

**Abstract**

Economic development in the region is now more wide open with the birth of government policies that favor to the region in the context of regional autonomy, but not only required to be autonomous as local authorities are also required to be autonomous in financial terms for the careful planning necessary. Investment expenditure component / direct government spending in the form of capital expenditures and personnel expenditures is one Boost the economy. As the North Sulawesi capital of Manado (Sulawesi) is a city that relies on the services sector in order to mendongkrak economy. This study used an analytical tool Ordinary Least Square (OLS) to determine how much influence capital expenditure and personnel expenditure towards economic improvement services sector. From the test results found to figures R square of 73.0, which means the effect of capital expenditure and personnel expenditure to economic growth service sector is 73 per cent while the remaining 27 percent influenced by other variables that are outside penelitian. Hal shows that the role of government through component spending is very influential on the increase in the services sector is one of the seed sector, to the serious attention through planning and allocation of expenditure need to be given more attention from the government.

Keywords: capital expenditures, personnel expenditures, Autonomy, Service Sector

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Pemerintah daerah saat ini mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam mengatur anggaran rumah tangganya. Dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, merupakan sebuah pendelegasian wewenang dari pusat ke daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan hak yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber perekonomiannya serta keuangan yang dimiliki untuk digunakan seluas-luasnya bagi kesejahteraan serta aspirasi yang berkembang di daerah masing-masing. Dalam UU tersebut menyebutkan dengan tegas bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya kedalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah (Nugroho, 2009). Otonomi daerah yang mengatur kebijakan pengelolaan Keuangan Negara yang semula sentralistik menjadi Desentralisasi Sipil (2013). Desentralisasi

Fiskal di Indonesia dilakukan dengan pemberian diskresi belanja daerah yang luas dengan didukung oleh pendanaan transfer dari pusat ke Daerah. Amanat itu tertuang dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah. Desentralisasi fiskal diarahkan untuk mewujudkan alokasi sumber daya Nasional yang efisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel melalui instrumen yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mengurangi horizontal imbalance, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dengan instrumen DAU, daerah diharapkan memiliki sumber daya fiskal yang memadai untuk menunjang tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan ekonomi daerah yang berbasis Keotonomian.

DAU yang merupakan *general purpose grant* atau *block grants* adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Setiap daerah memperoleh besaran DAU yang tidak sama, karena harus dialokasikan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) dan Alokasi Dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kebutuhan pendanaan daerah diukur secara berturut-turut dari jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal (Diko, 2011).

Selain dana transfer dari pemerintah pusat, salah satu sumber pendapatan utama pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), tinggi maupun rendahnya tingkat PAD di sebuah daerah mengindikasikan tingkat kemandirian sebuah daerah untuk tidak terlalu bergantung kepada kucuran dana dari pemerintah pusat dan dapat membiayai anggaran rumah tangganya sendiri. Namun dalam prakteknya sendiri banyak daerah yang masih mengandalkan Dana Transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)nya. Rata-rata Pemerintah daerah tingkat kemandiriannya masih berada di bawah 25 %, atau PADnya masih sangat kecil, dan sisanya masih berharap kucuran dana dari pemerintah pusat melalui DAU, DAK dan lain-lain. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa kemampuan daerah untuk dapat mengatur perekonomian serta potensi yang dimilikinya masih sangat terbatas karena faktor ketergantungan kepada pemerintah pusat yang masih tinggi, sehingga banyak kebijakan dari pemerintah pusat dalam pengelolaan potensi sumber keuangan harus diikuti oleh pemerintah daerah, dan sumber-sumber keuangan yang potensial masih tetap dikuasai oleh pemerintah pusat (Yani, 2002:3).

Dana-dana yang telah terserap ini kemudian disatukan dalam sebuah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). R-APBD ini kemudian akan dibahas kembali oleh pihak legislative dan eksekutif untuk kemudian mengeluarkan sebuah produk undang-undang yang bernama APBD di tahun selanjutnya. Di dalam APBD ini sendiri ada beberapa komponen pengeluaran pemerintah yang telah di ajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Dinas-Dinas terkait yang ada di daerah. Namun secara garis besar ada dua pengeluaran pemerintah yakni pengeluaran Belanja Langsung, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan jasa. Yang dimaksud dengan belanja langsung sendiri adalah komponen belanja yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya, karena belanja tersebut adalah bentuk belanja pembangunan guna menstimulus perekonomian. Yang kedua adalah belanja tidak langsung, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah setingkat dibawah, belanja partai politik serta belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung sendiri adalah komponen belanja pemerintah yang tidak harus dilakukan setiap tahun namun hanya menyesuaikan dengan kebutuhan serta bentuk kegiatan yang sudah tertata.

Sulawesi Utara adalah sebuah daerah yang dikenal luas sebagai sebuah daerah yang mempunyai tenggang rasa tinggi serta kerukunan masyarakatnya, letaknya yang strategis di bibir pasifik serta berbagai keindahan alamnya menjadikan bumi nyiur melambai salah satu daerah yang memukau

banyak mata untuk datang berkunjung bahkan menanamkan investasinya. Dengan banyaknya potensi yang dimiliki serta investasi yang terus tumbuh membuat daerah ini bukan hanya salah satu kawasan yang berpotensi untuk menjadi pusat perdagangan di Indonesia namun juga dunia. Tak tinggal diam pemerintah daerah juga terus melihat dan menopang potensi yang ada, dengan berbagai ieven bertingkat nasional bahkan internasional takhenti digelar di daerah ini.

Manado sebagai Ibukota Sulawesi Utara tentu jadi pusat perekonomian dan pertukaran informasi di daerah ini. Di dasari peluang ini maka pemerintah kota Manado kian gencar menggenjot perekonomiannya, bahkan peningkatan luar bias PAD serta tingkat kemandirian terus terjadi. Pihak swasta yang melihat perkembangan ini pun nampaknya tak tinggal diam dan menunggu, buktinya pembangunan yang terus terjadi dikota Manado bukan hanya berasal dari pembangunan yang dilakukan namun juga lebih banyak pembangunan yang berasal dari pihak swasta, mulai dari pembangunan Mal-Mal, hotel, bahkan tempat-tempat usaha seperti café dan rumah makan terus menjamur di kota Manado.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas muncul pertanyaan apakah bentuk investasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang perekonomiannya dan tingkat kemandiriannya memberikan efek pada pihak lain terlebih Manado sebagai kota jasa. Sehingga melatarbelakangi perumusan masalah “Bagaimana pengeluaran investasi pemerintah dalam bentuk belanja langsung berpengaruh pada pertumbuhan jasa swasta di kota Manado” ?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan jasa swasta.

Untuk mengetahui apakah belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap pertumbuhan jasa swasta.

Untuk mengetahui apakah belanja pegawai berpengaruh terhadap pertumbuhan jasa swasta.

### **Manfaat Penelitian**

Selain itu kiranya penelitian ini dapat bermanfaat sebagai :

- Kiranya penelitian ini dapat menjadi masukan dan referensi kepada para pembuat kebijakan dan dapat bermanfaat bagi Pemerintah dalam mengambil keputusan pembangunan daerah di masa yang akan datang.
- Kiranya penelitian ini memberi manfaat serta referensi bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan pembangunan daerah

### **Penelitian Terdahulu**

Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran, Pendekatan Analisis Jalur, Anis Setiyawati, 2005. Di dalam penelitian ini didapatkan bahwa pendapatan utama pemerintah daerah baik bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat maupun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan alokasi anggaran pembangunan dari pemerintah daerah mempunyai korelasi positif atau sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang diambil dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang artinya setiap peningkatan yang terjadi baik dari DAU, DAK, PAD maupun belanja pembangunan juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kemiskinan dan pengangguran juga dipengaruhi oleh pendapatan dan belanja pembangunan yang dilakukan oleh daerah.

Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Sektor Potensial di Kabupaten Asahan, pendekatan model basis ekonomi dan swot, Taufik Zainal Abidin, 2008. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa ada beberapa sector ekonomi potensial yang secara konsisten selama periode penelitian terus memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni sector pertanian, sector industry, kelistrikan, gas, dan air. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah di kabupaten Asahan perlu untuk menerapkan strategi guna mempertahankan bahkan meningkatkan potensi perekonomian yang dimiliki bahkan untuk mengembangkan potensi sector-sector ekonomi yang sebelumnya belum terkelola dengan maksimal.

Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Aceh Utara Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB, Fachrurrazy, 2008. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan memetakan mana saja sektor unggulan yang dimiliki oleh kabupaten Aceh Utara, dengan menggunakan data sekunder dalam kurun waktu 1993-2007 didapatkan hasil, sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat adalah sektor pertanian, pengangkutan dan sektor komunikasi, sedangkan untuk sektor basis didapati sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industry pengolahan serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan sektor yang kompetitif adalah sektor pertanian, sektor bangunan dan konstruksi serta sektor bank dan lembaga keuangan lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan menggunakan alat analisis Location Quotient menunjukkan bahwa sektor yang merupakan sektor unggulan di kabupaten Aceh Utara dengan kriteria sektor maju dan tumbuh pesat, sektor basis, dan kompetitif adalah sektor pertanian.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Belanja Daerah

Pengertian Belanja menurut PSAP No.2, Paragraf 7 (dalam Erlina dkk, 2008) adalah “semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua. “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:

1. Belanja Operasi. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi:
  - a. Belanja pegawai,
  - b. Belanja barang,
  - c. Bunga,
  - d. Subsidi,
  - e. Hibah,
  - f. Bantuan sosial.
2. Belanja Modal. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi:
  - a. Belanja modal tanah,
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin,
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan,
  - d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan,
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya,
  - f. Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)
3. Belanja Lain-lain/belanja Tak Terduga. Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Belanja Transfer. Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.

Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Langsung. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja:

- a. Belanja pegawai,
- b. Belanja barang dan jasa,
- c. Belanja modal.

2. Belanja Tidak Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja pegawai,
- b. Belanja bunga,
- c. Belanja subsidi,
- d. Belanja hibah,
- e. Belanja bantuan sosial,
- f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah yang diperoleh baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah. Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa pada dasarnya, pemerintahan daerah memiliki peranan penting dalam pemberian pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa permintaan terhadap pelayanan publik dapat berbeda-beda antar daerah. Sementara itu, Pemerintah Daerah juga memiliki yang paling dekat dengan publik untuk mengetahui dan mengatasi perbedaan-perbedaan dalam permintaan dan kebutuhan pelayanan publik tersebut. Satu hal yang sangat penting adalah bagaimana memutuskan untuk mendelegasikan tanggung jawab pelayanan publik atau fungsi belanja pada berbagai tingkat pemerintahan. Secara teoritis, terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam pendelegasian fungsi belanja, yaitu pendekatan “pengeluaran” dan pendekatan “pendapatan”.

Menurut pendekatan “pengeluaran”, kewenangan sebagai tanggung jawab antar tingkat pemerintahan dirancang sedemikian rupa agar tidak saling timpang tindih. Pendelegasian ditentukan berdasarkan kriteria yang bersifat obyektif, seperti tingkat lokalitas dampak dari fungsi tertentu, pertimbangan keseragaman kebijakan dan penyelenggaraan, kemampuan teknik dan manajerial pada umumnya, pertimbangan faktor-faktor luar yang berkaitan dengan kewilayahan, efisiensi dan skala ekonomi, sedangkan menurut pendekatan “pendapatan”, sumber pendapatan publik dialokasikan antar berbagai tingkat pemerintah yang merupakan hasil dari tawar-menawar politik. Pertukaran iklim politik sangat mempengaruhi dalam pengalokasian sumber dana antar tingkat pemerintahan. Selanjutnya, meskipun pertimbangan prinsip di atas relevan, namun kemampuan daerah menjadi pertimbangan yang utama.

## Konsep Jasa

Apabila kita menggunakan database seperti *ABI Inform* atau *Proquest* untuk mencari artikel yang mengandung kata kunci 'service', maka akan muncul ratusan ribu entri. Disatu sisi hal ini menggambarkan dinamika dan signifikansi peran *service*, khususnya dalam beberapa dekade terakhir. Disisi lain, apabila kita telusuri satu persatu entri bersangkutan, definisi *service* yang diacu pada masing-masing artikel bisa berbeda-beda. (Tjiptono,2011). Dalam bahasa Indonesia saja, *sevice* bisa diterjemahkan sebagai jasa, layanan dan servis; tergantung pada konteksnya. Keanekaragaman makna dalam hal pemakaian istilah *service* juga ijumpai dalam lietartur manajemen. Kendati demikian secara garis besar konsep "service" mengacu pada tiga lingkup definisi utama: industry, output atau penawaran dan proses(John dalam Tjiptono, 2011). Dalam konteks industri, istilah jasa digunakan untuk menggambarkan berbagai sub – sector dalam kategorisasi aktivitas ekonomi. Dalam lingkup penawaran, jasa dipandang sebagai produk *intangible* yang outputnya lebih berupa aktivitas ketimbang oyek fisik, meskipun dalam kenyataannya banyak pula jasa yang melibatkan produk fisik. Sebagai proses jasa mencerminkan penyampaian jasa inti, interaksi personal, kinerja (*performances*) dalam arti luas serta pengalaman layanan. Lebih lanjut, Johns(1999) dalam Tjiptono (2011) menegaskan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara perspektif penyedia jasa dan perspektif pelanggan terhadap konsep *service*. Berdasarkan perspektif penyedia jasa, proses jasa mencakup elemen-elemen penyampaian inti dan kinerja interpersonal. Elemen-elemen ini berbeda antara industry dan proses jasa, serta harus dikelola dengan cara-cara yang berlainan pula.

Sementara itu berdasarkan perspektif pelanggan, jasa lebih dilihat sebagai pengalaman berupa transaksi inti dan pengalaman personal, yang proporsinya berbeda-beda antar output jasa dan *services encounters* serta berkontribusi secara berbeda terhadap pengalaman masing-masing individu pelanggan. Dengan kata lain, penyedia jasa memandang jasa dari kacamata proses yang terkait dengan operasi jasa, sedangkan pelanggan lebih mempersepsikan jasa sebagai fenomena atau bagian dari pengalaman hidup. Jasa bukan saja hadir sebagai produk utama, namun juga dalam wujud layanan pelengkap dalam pembelian produk fisik. Kini setiap konsumen tidak lagi sekedar sebuah produk fisik, tetapi juga segala aspek jasa / layanan yang melekat pada produk tersebut, mulai dari tahap pra – pembelian hingga purnabeli. (Tjiptono, 2011). Dalam bab ini akan dibahas konsep jasa yang akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu definisi jasa, karakter jasa, dan klasifikasi jasa.

## Definisi Jasa

Jasa merupakan suatu hasil yang diciptakan melalui aktivitas dalam keterkaitan antara pemasok dan pelanggan dan melalui aktivitas internal pemasok, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (Gaspersz, 1997). Jasa (*service*) adalah suatu produk yang tidak nyata (*intangible*) dari hasil kegiatan timbal balik antara pemberi jasa (*producer*) dan penerima jasa (*customer*) melalui suatu atau beberapa aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (Yoeti, 2001). Jasa (*service*) adalah tindakan atau kerja yang menciptakan manfaat bagi pelanggan pada waktu dan tempat tertentu, sebagai hasil dari tindakan mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam diri atau atas nama penerima jasa tersebut (Lovelock and Wright, 1999) Menurut Kotler (2000) dalam Tjiptono (2005), jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat *intangible* (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.

Walaupun demikian produk jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. Maksudnya ada produk jasa murni ada pula jasa yang membutuhkan produk fisik sebagai persyaratan utama. Menurut Zeithaml dkk (1996) dalam Yazid (2001), jasa mencakup semua aktivitas ekonomi yang keluarannya bukanlah produk atau konstruksi fisik, yang secara umum konsumsi dan produksinya dilakukan pada waktu yang sama, dan nilai tambah yang diberikannya dalam bentuk kenyamanan, hiburan, kecepatan, dan kesehatan yang secara prinsip bersifat *intangible*. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jasa bukan suatu

barang melainkan suatu proses atau aktivitas yang tidak berwujud untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

### **Karakteristik Jasa**

Ada empat karakteristik jasa yang membedakannya dengan barang (Tjiptono, 2000), keempat karakteristik tersebut meliputi:

#### *Intangibility*

Jasa bersifat *intangibility* yang artinya tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar dan diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Konsumen jasa tidak memiliki jasa yang dibelinya melainkan hanya dapat menggunakan, memanfaatkan, atau menyewa jasa tersebut. Konsumen jasa tidak dapat menilai hasil jasa sebelum menikmatinya sendiri, hal ini karena jasa mengandung unsur *experience quality*, yaitu karakteristik-karakteristik yang hanya dapat dinilai pelanggan setelah mengkonsumsinya. Nilai penting dari sifat *intangible* adalah nilai tak terwujud yang dialami konsumen dalam bentuk kenikmatan, kepuasan, atau kenyamanan.

#### *Inseparability*

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual lalu dikonsumsi, sedangkan untuk jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Karakteristik ini berarti bahwa pemberian jasa diperlukan interaksi langsung antara produsen dengan konsumen (pengguna jasa) dan inilah ciri khusus dan unsur terpenting dari pemasaran jasa. Selain itu diperlukan juga perhatian khusus untuk keterlibatan pelanggan dalam proses jasa, fasilitas pendukung dan juga pemilihan lokasi (untuk penyedia jasa yang mendatangi pelanggan).

#### *Variability*

Jasa memiliki karakteristik ini karena jasa mempunyai sifat sangat variabel yang merupakan *non-standardized output* yang artinya mempunyai banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut dihasilkan. Dalam melakukan pembelian jasa konsumen harus menyadari tingginya variasi dari jasa yang akan dibeli. Menurut Bovee et al. (1995) ada tiga faktor yang menyebabkan variabilitas kualitas jasa yaitu kerjasama atau partisipasi pelanggan selama penyampaian jasa, moral/motivasi karyawan dalam melayani pelanggan, dan beban kerja perusahaan.

#### *Perishability*

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Bila permintaan berfluktuasi, berbagai masalah akan muncul berkaitan dengan kapasitas. Misalnya menganggur saat permintaan sepi dan pelanggan tidak terlayani dengan resiko mereka kecewa ataupun beralih ke penyedia jasa lainnya saat permintaan puncak.

### **Klasifikasi Jasa**

Sejauh ini banyak pakar yang mengemukakan skema klasifikasi jasa, dimana masing-masing ahli menggunakan dasar perbedaan disesuaikan dengan sudut pandangnya sendiri-sendiri. Menurut Tjiptono (2005), secara garis besar klasifikasi jasa dapat dilakukan berdasarkan tujuh kriteria pokok yaitu:

#### Segmen pasar

Berdasarkan segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi:

- a. Jasa yang ditujukan pada konsumen akhir seperti taksi, asuransi jiwa, katering, jasa tabungan, dan pendidikan.
- b. Jasa bagi konsumen organisasi seperti biro periklanan, jasa akuntansi dan perpajakan, dan jasa konsultasi manajemen.

#### Tingkat keberwujudan

Berdasarkan tingkat keberwujudan, jasa dapat dibedakan menjadi:

#### *Rented-good service*

Dalam tipe ini konsumen menyewa dan menggunakan produk tertentu berdasarkan tarif yang disepakati selama jangka waktu spesifik, seperti penyewaan kendaraan, VCD, apartemen, dan lain-lain.

#### *Owned-good service*

Pada tipe ini produk yang dimiliki konsumen disepakati, dikembangkan, atau ditingkatkan kinerjanya melalui pemeliharaan atau perawatan oleh perusahaan jasa seperti jasa reparasi AC, arloji, motor, komputer, dan lain-lain.

#### *Non-good service*

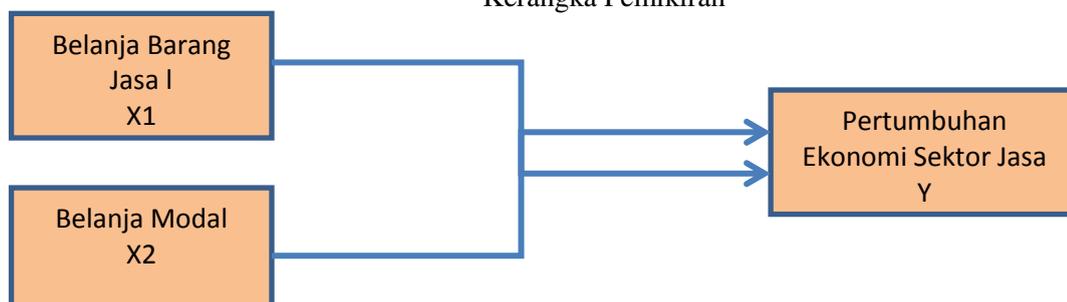
Karakteristik khusus pada jenis ini adalah jasa personal yang bersifat *intangibile* yang ditawarkan kepada para pelanggan, seperti supir, dosen, penata rias, pemandu wisata, dan lain-lain.

Keterampilan penyedia jasa

1. Berdasarkan tingkat penyedia jasa terdapat dua tipe pokok jasa, yaitu:
  - a. *Professional service* seperti dosen, konsultan manajemen, pengacara, dokter, dan lain-lain.
  - b. *Non professional service* seperti supir taksi, tukang parkir, pengantar surat, tukang sampah, dan lain-lain.
2. Tujuan organisasi penyedia jasa  
Berdasarkan tujuan organisasi, jasa dapat diklasifikasikan menjadi:
  - a. *Commercial service/profit service* seperti jasa penerbangan, bank, penyewa mobil, hotel, dan lain-lain.
  - b. *Non-profit service* seperti sekolah, panti asuhan, perpustakaan, museum, dan lain-lain.
3. Regulasi  
Dari aspek regulasi, jasa dapat dibagi menjadi:
  - a. *Regulated service* seperti jasa pialang, angkutan umum, media masa, perbankan, dan lain-lain.
  - b. *Non-regulated service* seperti jasa makelar, katering, kost, asrama, kantin sekolah, dan lain-lain.
4. Tingkat intensitas karyawan  
Berdasarkan tingkat intensitas karyawan (keterlibatan tenaga kerja), jasa dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:
  - a. *Equipment-based service* seperti cuci mobil otomatis, jasa sambungan telepon internasional dan lokal, ATM (Anjungan Tunai Mandiri), dan lain-lain.
  - b. *People-based service* seperti pelatih sepak bola, satpam, akuntan, konsultan hukum, bidan, dokter, dan lain-lain.
5. Tingkat kontak penyedia jasa dan pelayanan  
Berdasarkan tingkat kontak ini, secara umum jasa dapat dikelompokkan menjadi:
  - a. *High-contact service* seperti universitas, bank, dokter, penata rambut, dan lain-lain.
  - b. *Low-contact service* seperti bioskop, jasa, PLN, jasa komunikasi, jasa layanan pos, dan lain-lain.

industry dan proses jasa, serta harus dikelola dengan cara-cara yang berlainan pula. Sementara itu berdasarkan perspektif pelanggan, jasa lebih dilihat sebagai pengalaman berupa transaksi inti dan pengalaman personal, yang proporsinya berbeda-beda antar output jasa dan *services encounters* serta berkontribusi secara berbeda terhadap pengalaman masing-masing individu pelanggan. Dengan kata lain, penyedia jasa memandang jasa dari kaca mata proses yang terkait dengan operasi jasa, sedangkan pelanggan lebih mempersepsikan jasa sebagai fenomena atau bagian dari pengalaman hidup. Jasa bukan saja hadir sebagai produk utama, namun juga dalam wujud layanan pelengkap dalam pembelian produk fisik. Kini setiap konsumen tidak lagi sekedar sebuah produk fisik, tetapi juga segala aspek jasa / layanan yang melekat pada produk tersebut, mulai dari tahap pra – pembelian hingga purnabeli. (Tjiptono, 2011). Dalam bab ini akan dibahas konsep jasa yang akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu definisi jasa, karakter jasa, dan klasifikasi jasa.

Kerangka Pemikiran



## **Hipotesis**

- Diduga belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap peningkatan sektor jasa di kota Manado.
- Diduga modal berpengaruh terhadap peningkatan Sektor jasa di kota Manado.

## **METODE PENELITIAN**

### **Data dan Sumber Data**

#### **Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  
Data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk angka-angka  
Data tentang belanja langsung kota Manado  
Data tentang belanja tidak langsung kota Manado  
Data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Manado Khususnya sub-sektor jasa  
Sejarah singkat kota Manado

#### **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

##### **Data Sekunder**

Data yang diperoleh secara tidak langsung baik lewat dokumen, lewat orang lain, internet atau melalui organisasi-organisasi yang bersangkutan.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengambilan data sekunder, data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Ini dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini mengambil data dari APBD Kota Manado tahun 2007 sampai 2013. Serta data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Manado dari tahun yang sama.

#### **Metode Analisis**

Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum, pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti (Sekaran, 1992). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Secara umum, analisis regresi adalah analisis mengenai variabel independen dengan variabel dependen yang bertujuan untuk mengestimasi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2003). Teknik yang digunakan untuk mencari nilai persamaan regresi yaitu dengan analisis *Least Squares* (kuadrat terkecil) dengan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan. Dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, juga menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan dependen, sehingga dapat membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut (Ghozali, 2006). Dimana dalam penelitian ini, tiga komponen dari pendapatan daerah yaitu pajak daerah, dana retribusi dan PAD lain yang sah sebagai variabel independen, akan dianalisis pengaruhnya terhadap alokasi belanja daerah yang diukur belanja langsung sebagai variabel dependen. Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis regresi linier masing- masing akan dijelaskan di bawah ini:

#### **Statistik Deskriptif**

Penyajian statistik deskriptif bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan sub-sektor transportasi.

#### **Uji Asumsi Klasik**

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikolinieritas, dan heterokedastisitas. Untuk

itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari:

### **Uji Normalitas**

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik terbesar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan: Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar lebih jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2006). Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2006).

### **Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Uji multikolonieritas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolonieritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolonieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* <0,10 atau sama dengan nilai  $VIF > 10$  (Ghozali, 2006).

### **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi berganda linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1(sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan, menjadi tidak layak untuk dipakai (Singgih Santoso, 2000). Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Durbin Watson*. Singgih (2000), bila angka D-W diantara -2 samapai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi. Menurut Ghozali (2006), untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test)

### **Uji Heteroskedastisitas**

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi

variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali,2006).

### **Model Regresi**

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda linier yang digunakan untuk melihat pengaruh pendapatan yaitu Belanja Langsung dan Belanja tidak langsung terhadap peningkatan sub-sektor transportasi yang berupa alokasi belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung).

$$Y = @ + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

@ = Konstanta

X1 = Belanja barang jasa

X2 = Belanja Modal

Y = Sektor Jasa

$\beta_1 \beta_2$  = koefisien regresi untuk variable x1,x2

e = Variabel pengganggu

### **Uji Statistik**

Uji statistic dalam penelitian ini meliputi uji-t dan uji-f, dan uji  $R^2$  dimana uji statistic ini untuk melihat apakah variable belanja langsung dan belanja tidak langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan sub-sektor transportasi

### **Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel- variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

### **Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka hipotesis alternatif diterima artinya semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

### **Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji statistik t ini digunakan karena untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel maka berarti t hitung tersebut signifikan artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan melihat *p-value* dari masing-masing variabel. Hipotesis diterima apabila *p-value* < 5 % (Ghozali, 2006)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengujian Asumsi klasik

Untuk memperoleh hasil regresi berganda yang baik maka terlebih dahulu digunakan uji asumsi klasik, untuk menguji variable Modal (X1) belanja barang jasa (X2) dan sektor jasa (Y) yang akan diteliti.

### Multikolerasi

Tabel 1  
Hasil uji Multikolinearitas Model Summary (a) coefficient

Model	Correlations	Collinearity Statistics	
	Part	Tolerance	VIF
1			
(Constant)			
BELANJA BARANG DAN JASA	.320	.165	6.048
BELANJA MODAL	.030	.165	6.048

Berdasarkan hasil collinearity statistics dapat dilihat pada output coefficient model, dikatakan terjadi gejala multikolinearitas jika nilai VIF > 10. Hasil perhitungan menunjukkan nilai VIF untuk variable belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar  $6.048 < 10$ , maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi tersebut.

### Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Menurut Singgih Santoso (2004 :219) untuk mengetahui adanya autokorelasi digunakan uji Durbin Watson (DW test). Model regresi dikatakan tidak terdapat korelasi apabila nilai Durbin Watson berkisar 1,55 sampai 2,46 (untuk  $N < 15$ )

Tabel 2  
Uji Autokorelasi

Change Statistics	
Sig. F Change	Durbin-watson
.038	.954

Model Summary (b)

a. Predictors: (Constant), Modal, belanja barang jasa

b. Dependent Variable: sektor Jasa

Sumber data : Pengolahan Data 2015

Pada analisis regresi terlihat bahwa nilai DW 0,954 dan nilai DL 0.1714 , dan DU 0,149 . $DL < DW < DU$  yakni 0.610 DL, 0,951 DW, 1,400 DU. DW berada pada antara DL dan DU dan berada pada titik keragu-raguan. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala autokorelasi yang lemah

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda  
 Berdasarkan hasil uji regresi didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 3  
 Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Square Change	F Change
1	.854a	.730	.622	.09580	.730	6.764

a. Predictors: (Constant), Belanja modal, Belanja barang dan jasa

b. Dependent Variable: jasa swasta

Sumber Data : Pengolahan Data 2015

Dalam melihat pengaruh Variabel Independen Exogenous belanja tidak langsung dan belanja langsung secara bersama-sama terhadap variabel Dependen Endogenous sub-sektor transportasi dapat dilihat pada Tabel 3 Model Summary diatas, pada nilai R square. Besarnya R square (R<sup>2</sup>) pada tabel ini adalah 0,730. Angka tersebut mempunyai makna Besarnya pengaruh Variabel independen exogenous belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap variabel dependen endogenous sub-sektor transportasi secara gabungan. Dalam menghitung Koefisien Determinasi (KD) dapat diketahui dengan rumus :

$$KD = R^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,730 \times 100\%$$

$$KD = 73,0\%$$

Besarnya pengaruh Variabel Independen belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap Variabel Dependen sub-sektor transportasi secara gabungan adalah 73,0 %. Dan pengaruh diluar model dapat di hitung dengan :

$$e = 1 - R^2$$

$$e = 1 - 0,730$$

$$e = 0,260 \times 100\%$$

$$e = 26,0\%$$

Yang berarti 26,0% besarnya faktor lain yang mempengaruhi diluar model yang di teliti. Artinya besarnya pengaruh variabel independen modal dan belanja barang jasa terhadap variabel dependen sektor jasa adalah sebesar 73.0 %, sedangkan pengaruh sebesar 26,0% disebabkan oleh variabel di luar model yang di teliti.

Tabel 4  
 Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.697	3.038		1.217	.278
	BELANJA BARANG DAN JASA	.894	.649	.788	1.378	.227
	BELANJA MODAL	.085	.670	.073	.127	.904

a. Dependent Variable: Jasa swasta

Coefficients (a)

Sumber Data : Pengolahan Data 2015

Pengaruh Variabel Independen belanja langsung terhadap peningkatan sub-sektor transportasi Untuk melihat apakah ada Pengaruh Linier Variabel Independen Exogenous Pengeluaran Pajak Daerah terhadap Variabel Dependen Endogenous Belanja Langsung. Dapat dilihat pada tabel 4.4 Coefficients(a). Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom DF = n –

$(K+1)$  atau  $DF = 7 - (2+1) = 4$ . Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar 1,837 (untuk uji dua arah). Dalam perhitungan SPSS yang tertera pada tabel Coefficients di atas dimana tabel t adalah untuk menunjukkan bahwa adanya Pengaruh linier antara Variabel Independen belanja langsung terhadap Variabel Dependen sub-sektor transportasi ialah 0,191. Menghitung besarnya angka t tabel / nilai kritis dengan ketentuan sebagai berikut : Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom  $DF = n - (K+1)$  atau  $7 - (2+1) = 4$ . Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar -3,070 (untuk uji dua arah)

Pengujian Hipotesis t kriterianya sebagai berikut :

1. Jika t hitung  $>$  t tabel, maka  $H_0$  ditolak, dan  $H_1$  diterima
2. Jika t hitung  $<$  t tabel, maka  $H_0$  diterima, dan  $H_1$  ditolak

Dimana dalam melihat pengaruh signifikan atau tidak Kriterianya adalah sebagai berikut :

1. Jika Signifikan  $<$  0,05 maka berpengaruh signifikan
2. Jika Signifikan  $>$  0,05 maka tidak ada pengaruh signifikan

Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar  $1,217 <$  t tabel sebesar 2,132. Dengan demikian keputusannya ialah  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya ada pengaruh linear antara variable independen belanja barang jasa terhadap variable independen sektor jasa. Besarnya pengaruh Variabel Independen Exogenous belanja barang jasa terhadap Variabel Dependen sektor jasa diketahui dari nilai Koefisien Beta (dalam kolom Standardized Coefficients Beta) ialah 0,788 Signifikan karena nilai signifikansi / probabilitas hasil yang tertera pada kolom Sig ,278  $>$  0,05.

Pengaruh Variabel Independen Exogenous belanja tidak langsung Variabel Dependen Endogenous sub-sektor transportasi.

Untuk melihat apakah ada Pengaruh Linier Variabel Independen belanja tidak langsung terhadap Variabel Dependen Endogenous sub-sektor transportasi. Dapat dilihat pada tabel Coefficients(a) Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom  $DF = n - (K+1)$  atau  $DF = 7 - (2+1) = 4$ . Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar 2,132 (untuk uji dua arah) Dalam perhitungan SPSS yang tertera pada tabel Coefficients di atas dimana tabel t adalah untuk menunjukkan bahwa adanya Pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenous belanja tidak langsung terhadap Variabel Dependen Endogenous sub-sektor transportasi ialah 8.313. Menghitung besarnya angka t tabel / nilai kritis dengan ketentuan sebagai berikut : Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom  $DF = n - (K+1)$  atau  $7 - (2+1) = 4$ . Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar 2,132 (untuk uji dua arah) Pengujian Hipotesis t kriterianya sebagai berikut :

1. Jika t hitung  $>$  t tabel, maka  $H_0$  ditolak, dan  $H_1$  diterima
2. Jika t hitung  $<$  t tabel, maka  $H_0$  diterima, dan  $H_1$  ditolak

Dimana dalam melihat pengaruh signifikan atau tidak Kriterianya adalah sebagai berikut :

1. Jika Signifikan  $<$  0,05 maka berpengaruh signifikan
2. Jika Signifikan  $>$  0,05 maka tidak ada pengaruh signifikan

Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar  $1,378 >$  t table sebesar 1,132. Dengan demikian keputusannya ialah  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya ada pengaruh linier antara Variabel Independen belanja barang jasa terhadap Variabel Dependen Endogenous sektor jasa. Maka Variabel Independen Exogenous belanja modal berpengaruh terhadap Variabel Dependen Endogenous sektor jasa. Besarnya pengaruh Variabel Independen Exogenous belanja modal terhadap Variabel Dependen Endogenous sektor jasa diketahui dari nilai Koefisien Beta (dalam kolom Standardized Coefficients Beta) ialah 0,730 Signifikan karena nilai signifikansi/ probabilitas hasil yang tertera pada kolom Sig 0.904  $>$  0,005.

## **Pembahasan**

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa variable pengeluaran belanja investasi yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan sebagai variable independent yakni belanja modal, dan belanja barang dan jasa mempunyai hubungan yang erat dengan peningkatan yang terjadi di sector jasa. Hal ini ditunjukkan dengan hasil R square yang mencapai angka 73 persen yang artinya bahwa pertumbuhan sector jasa yang terjadi di kota Manado 73 persennya dipengaruhi oleh belanja modal dan belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah sedangkan 27 persen lainnya dipengaruhi oleh sector lain yang ada di luar penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah dalam menunjang dan

memajukan sector jasa yang ada di Manado masih amat besar, hal ini juga menggambarkan bahwa jasa yang ditawarkan di Manado sebagian besarnya masih menargetkan pasar ke kalangan pemerintah. Dan ini menjadi hal yang menguntungkan karena pemerintah bias secara langsung memberikan pengaruh terhadap salah satu sector unggulan yang dimiliki secara langsung dan signifikan namun di satu sisi ini juga menunjukkan ketergantungan yang besar sector jasa terhadap peran serta dan pengeluaran belanja barang jasa dan belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal dan belanja barang jasa mempunyai tingkat pengaruh yang sangat signifikan hingga mencapai angka 79 % terhadap peningkatan sector jasa, yang artinya tinggal tersisa 21 % yang dipengaruhi oleh variable lain yang ada di luar penelitian, hal ini tentu menggambarkan bagaimana peran serta pemerintah melalui belanja langsung yang dilakukan, terlebih dalam alokasi belanja modal dan belanja barang jasa sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan sector jasa di Kota Manado yang dikenal sebagai salah satu kota jasa di Sulawesi Utara.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap tingkat pengaruh belanja langsung pemerintah melalui belanja modal dan belanja barang jasa terhadap peningkatan sector jasa di Kota Manado penulis coba memberikan saran sebagai berikut.

pengalokasian anggaran belanja investasi oleh pemerintah perlu untuk lebih dimatangkan dalam perencanaannya, apalagi pengaruhnya yang sangat besar dan signifikan terhadap peningkatan yang terjadi di sector jasa.

Manado sebagai kota jasa tentunya berharap sebagian besar pertumbuhan ekonomi serta PAD berasal dari sector ini untuk itu perlu ada perhatian lebih serius dari pemerintah terhadap sector jasa.

## **Daftar Pustaka**

- Gaspersz, Vincent, (1997)**, Manajemen Kualitas dalam Industri Jasa, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Fandy Tjiptono, 2005**. Pemasaran Jasa, Malang: Bayumedia Publishing
- Erlina, 2008**. Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi2, Cetakan pertama, USU Press, Medan
- Erlina, dan Sri Mulyani, 2007**. Metodologi Penelitian Bisnis, Edisi Pertama, USU Press, Medan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua
- Tjiptono, Fandy. 2011**. Service, Quality & Satisfaction. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Yoeti, O . A 2001**, Ilmu pariwisata perkembangan dan prospeknya, Jakarta, pelita
- Lovelock, Christopher H., and Lauren K, Wright. 2005**. Principles of Service Marketing Management. New Jersey: Prentice-Hall, Inc
- Zeithaml, V., Parasuraman, A., Berry, L (1990)** Deleverly Quality Service Balancing Customer Perception and Expectation, USA :Free Pres Collier Macmillan Publisher
- Bovee, Courthland L., dan William F. Arens, 1986**, Comtemporary Advertising, Illionis: Irwan Homewood.
- Kotler, Philip & Kevin Lane Keller, 2007**. Manajemen Pemasaran, cetakan pertama, edisi bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Indeks
- Sekaran, Uma (1992)**, Research Methods for Business : Skill Building Approach;2nd Edition, John Wiley & Sons, Inc
- Gujarati, D.N (2003)**, Basic Econometric, 4th Edition; McGraw Hill, Inc.
- Ghozali, Imam. 2006**. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Sess. Cetakan keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Manado